JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (JTIK) VOL 16, No.1, Maret 2025, pp. 79 - 89
p-ISSN : 2087-0868 (media cetak)
e-ISSN : 2598-9707 (media online)
http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP

PEMAHAMAN DAN PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK AKTIVIS GENERASI Z MENJELANG PILKADA 2024 DI KOTA PALEMBANG

Siti Maharani Hardian[1], Ahmad Muhaimin, M.Si[2], M.Arif Setiawan, S.Sos., M.Ag[3]
[1,2,3]I Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K. H. Zainal AbidinFikri No. KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan
e-mail: 2110701002@radenfatah.ac,id[1], ahmadmuhaimin_uin@radenfatah.ac.id[2], Muhammadarifsetiawan_uin@radenfarah.ac.id[3]

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 26 – Januari - 2025
Received in revised form : 30 – Januari - 2025
Accepted : 3 – Februari - 2025
Available online : 1 – Maret - 2025

ABSTRACT

This study explores the understanding and practice of political communication among Generation Z activists ahead of the 2024 regional election in Palembang using a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with Generation Z activists and relevant literature analysis. The theory of symbolic interactionism is used to understand how political understanding is formed through communication and social interaction within the context of local politics. Generation Z activists in Palembang play a crucial role in disseminating political information, particularly to young voters, through community discussions and social media. The findings show that activists actively engage in various forms of political activities such as discussions, policy advocacy campaigns, and election monitoring to ensure a transparent and fair electoral process. Social media serves as their primary platform for spreading relevant political information and raising public awareness. However, activists also face challenges related to misinformation and disinformation on social media, which can negatively influence public opinion. Through social interactions within communities and organizations, these activists construct collective meanings regarding social and political issues that are highly relevant to their lives. In conclusion, the involvement of Generation Z activists in Palembang's 2024 regional election reflects their commitment to political and social change. Therefore, strengthening social media literacy, improving political education, and ensuring more transparent election monitoring are essential to empower young generations to continue acting as agents of change for societal progress. These activists play a critical role in supporting democratic sustainability and social advancement.

Keywords: *Generation Z, Political Communication, 2024 Regional Elections*

Received 26 – Januari - 2025*; Revised* 30 – Januari - 2025*; Accepted* 3 – Februari - 2025

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

1. PENDAHULUAN

Pemahaman politik merupakan kemampuan yang sangat penting bagi setiap individu dalam kehidupan demokrasi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung menjadi apatis dan tidak terlibat dalam proses politik yang berlangsung. Pemahaman politik mencakup keterampilan membaca dan menulis informasi politik, berpikir kritis, serta berkomunikasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat (Chamdan, Ginanjar, 2022). Dengan pemahaman politik yang baik, individu dapat lebih cerdas dalam menilai kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi. Hal ini termasuk dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam politik lokal. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang sadar dan peduli terhadap sistem pemerintahan.

Generasi Z, yang lahir setelah tahun 2001, memiliki karakteristik unik dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Mereka lebih mudah terhubung dengan isu-isu politik melalui media sosial, tetapi juga lebih rentan terhadap informasi yang tidak terverifikasi. Rendahnya partisipasi politik di kalangan generasi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap politik secara mendalam. Bukan hanya soal aktor dan partai politik, tetapi juga tentang bagaimana sistem politik bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jika generasi Z tidak memiliki pemahaman yang cukup, mereka cenderung bersikap pasif atau bahkan apatis terhadap politik (Krina Loina Lalolo & dan Munawaroh Zainal, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda agar mereka lebih aktif dalam demokrasi.

Di era digital, komunikasi politik menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi dan membangun pemahaman politik di masyarakat. Media sosial, media massa, dan berbagai platform komunikasi lainnya memungkinkan informasi politik tersebar dengan cepat dan luas. Aktor politik memanfaatkan media untuk menyampaikan pesan kepada publik, sementara masyarakat juga dapat menggunakan media sebagai alat untuk mengontrol pemerintah. Namun, tanpa literasi politik yang baik, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam hoaks dan propaganda yang menyesatkan. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi politik yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu memilah dan menganalisis informasi politik dengan kritis.

Aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik generasi Z. Sebagai agen perubahan, aktivis dapat menjadi penggerak yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam politik. Mereka dapat memanfaatkan media sosial, forum diskusi, dan berbagai metode komunikasi lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang konstruktif. Selain itu, aktivis juga dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politik (Elizamiharti & Nelfira, 2023). Dengan demikian, kehadiran aktivis dalam dunia politik tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kesadaran politik di kalangan generasi muda.

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini ingin memfokuskan untuk menggali bagaimana literasi politik di kalangan aktivis muda, terutama melalui cara mereka berbicara, baik melalui media sosial, forum diskusi, atau metode komunikasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk mengetahui seberapa besar Pemahaman komunikasi politik ini berdampak pada sikap dan perilaku politik orang-orang di Palembang dan bagaimana hal ini berkaitan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Penelitian ini merupakan bagian dari program studi Ilmu Komunikasi, diharapkan untuk memberikan pemahaman baru tentang hubungan antara literasi politik, peran aktif generasi muda dalam politik lokal, dan media komunikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran praktis tentang cara yang lebih baik untuk mengelola komunikasi politik di kalangan generasi muda di kota Palembang. Pada penelitian ini, peneliti mengambil tema **"Pemahaman dan Praktik Komunikasi Politik Aktivis Generasi Z Menjelang Pilkada 2024 Di Kota Palembang''.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketertarikan Generasi Muda Pada Politik

Ketertarikan generasi muda pada politik di Indonesia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi, lingkungan sosial, hingga sistem pendidikan. Generasi muda sebagai kelompok yang memiliki energi dan potensi besar. Mereka mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam isu-isu politik, terutama pada era digital. Kemunculan media sosial sebagai platform komunikasi telah membuka ruang bagi generasi muda

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

untuk mengakses informasi politik secara lebih mudah dan cepat (Harahap & Adeni, 2020). Mereka tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen yang berperan dalam menyebarkan opini dan membentuk persepsi politik di kalangan masyarakat.

Faktor utama yang mendorong ketertarikan generasi muda pada politik adalah keterkaitan isu-isu politik dengan kehidupan sehari-hari mereka. Generasi muda lebih tertarik pada isu-isu spesifik seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan pendidikan, dibandingkan dengan politik praktis yang melibatkan partai politik (Khairunisa dkk., 2024). Mereka cenderung memilih jalur advokasi atau Gerakan sosial untuk menyuarakan aspirasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda lebih menyukai pendekatan partisipasi langsung yang memiliki dampak nyata daripada hanya sekedar menjadi bagian dari sistem politik formal.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketertarikan generasi muda pada politik, diperlukan pendekatan yang lebih terbuka dan relevan dengan kebutuhan mereka. Sistem Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan literasi politik sejak dini menjadi salah satu Solusi penting. Selain itu, pemerintah dan partai politik perlu membangun kembali kepercayaan dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan generasi muda dalam pengambilan Keputusan. Dengan menciptakan lingkungan politik yang terbuka, ketertarikan generasi muda pada politik tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga dapat diarahkan untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

2.2 Komparasi Literasi Politik Dari Masa Ke Masa

Literasi politik mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam sistem politik telah berkembang seiring waktu di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, literasi politik difokuskan pada perjuangan kelompok untuk melawan penjajahan dan membangun identitas nasional. Pendidikan politik pada masa itu bersifat informal, dilakukan melalui diskusi kelompok di komunitas atau organisasi pemuda seperti Budi Utomo (Sholihatun, 2018). Kesadaran politik masyarakat dibangun melalui narasi kebangsaan yang kuat, dengan tokoh-tokoh nasional yang berperan sebagai penggerak utama.

Berbeda dengan masa awal kemerdekaan, literasi politik pada era Orde baru lebih didominasi oleh pendekatan struktural yang dikontrol oleh negara. Media massa digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung stabilitas politik yang diinginkan pemerintah. Sistem Pendidikan pada masa ini lebih banyak menekankan pada doktrinasi dibandingkan pengembangan kemampuan kritis. Hal ini menyebabkan masyarakat khususnya generasi muda memiliki pemahaman politik yang terbatas dan kurang partisipatif. Meski demikian, literasi politik tetap terpelihara melalui beberapa ruang informal, seperti diskusi kelompok dan organisasi kemahasiswaan.

Meski kemajuan teknologi memberikan peluang besar dalam meningkatkan literasi politik, tetapi tetap ada tantangannya. Salah satu masalah utama di era digital adalam disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi Masyarakat terhadap isu-isu politik. Generasi muda sering kali terjebak dalam fenomena filter bubble, dimana mereka hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri (Razaqa dkk., 2022). Oleh karena itu, literasi digital menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa literasi politik yang berkembang tidak hanya berbasis akses, tetapi juga berbasis kemampuan analisis kritis. Dengan memahami komparasi literasi politik dari masa ke masa, kita dapat melihat bagaimana tantangan dan peluang yang ada dapat dijadikan dasar untuk membangun Masyarakat yang lebih melek politik di masa depan.

2.3 Pola Komunikasi Politik Generasi Muda

Pola komunikasi politik generasi muda di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan seiring perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Generasi muda saat ini lebih memanfaatkan media digital, terutama media sosial sebagai platform utama untuk menyuarakan

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

aspirasi politik dan mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini. Media sosial seperti instagram, twitter, dan tiktok tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi politik, tetapi juga sebagai alat membangun opini publik dan memobilisasi aksi politik.

Salah satu aspek penting dalam pola komunikasi politik generasi muda adalah kemampuan mereka memanfaatkan strategi digital untuk menyampaikan pesan secara efektif. Generasi muda cenderung menggunakan pendekatan kreatif dalam menyampaikan ide politik mereka, seperti melalui video singkat, infografis, atau kampanye berbasis tagar. Hal ini tidak hanya membuat pesan politik lebih muda dipahami, tetapi juga membantu meningkatkan partisipasi politik di kalangan kelompok sebaya.

Namun, dibalik keunggulan media digital dalam pola komunikasi politik generasi muda, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Generasi muda sering kali terpapar disinformasi dan berita palsu yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap isu politik. Selain itu, fenomena filter bubble dan echo chamber di media sosial mempersempit keberagaman pandangan, sehingga menghambat dialog yang konstruktif (Wulandari dkk., 2021). Oleh karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan generasi muda mampu memilah informasi secara kritis dan membangun komunikasi politik yang sehat.

2.4 Teori Interaksi Simbolik

Sekitar tahun 1939, Herbert Blumer menciptakan gagasan tentang interaksi simbolik. Sebenarnya, George Herbert Mead adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan ini di bidang sosiologi, tetapi Blumer mengubahnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan masyarakat dengan individu dan hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat adalah ciri utama teori ini. Simbol yang dibuat oleh orang-orang mengubah cara mereka berinteraksi satu sama lain. Realitas sosial terdiri dari kumpulan peristiwa yang terjadi pada beberapa orang yang tergabung dalam Masyarakat (Abdul Muhid dan Winarto Eka Wahyudi, 2020).

Interaksi simbolik terjadi ketika orang berinteraksi satu sama lain secara sadar. Interaksi simbolik juga mencakup gerakan tubuh, suara atau vokal yang berbeda, gerakan fisik, dan ekspresi tubuh. Semua gerakan ini memiliki makna dan disebut simbol. Pada awal perkembangannya, pembahasan interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal daripada pada keseluruhan kelompok atau Masyarakat (Derung, 2017).

Dalam konsep interaksi simbolik, umumnya ada enam gagasan yang digunakan; a. Prilaku manusia memiliki makna di balik yang menggejala b. Pemaknaan kemanusiaan harus diambil dari interaksi sosial manusia c. Masyarakat adalah proses yang berkembang secara holistik, terpisah, tidak linier, dan tidak terduga d. Perilaku manusia berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologi e. Konsep mental manusia berkembang dialektik f. Perilaku manusia wajar dan konstruktif reaktif (Putra & Pribadi, 2020).

Alasan Peneliti menggunakan teori interaksi simbolik karena untuk menjelaskan bagaimana aktivis Generasi Z di Kota Palembang membentuk makna politik mereka melalui simbol-simbol dalam interaksi sosial, terutama menjelang Pilkada 2024. Di mana simbol-simbol politik seperti gambar calon, slogan, dan pesan kampanye dipahami dan ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing individu, yang mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam komunikasi politik. Contohnya, bagaimana mereka menggunakan media sosial sebagai simbol komunikasi politik untuk mengungkapkan dukungan atau kritikan terhadap calon tertentu, yang membentuk persepsi dan partisipasi mereka dalam dinamika politik lokal, sesuai dengan konsep dasar teori ini yang menyatakan bahwa makna suatu tindakan muncul dari interaksi sosial yang melibatkan simbol-simbol yang dapat dipahami oleh individu dalam konteks sosial yang lebih luas**.**

3 METODOLOGI PENELITIAN

Memanfaatkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, Yang dimaksud dengan “penelitian kualitatif” adalah penelitian yang menggunakan konteks tertentu, dengan tujuan untuk

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

menggambarkan fenomena yang sedang terjadi, dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia dalam penelitian kualitatif. Metode yang paling umum digunakan adalah wawancara dan observasi (Sidiq,umar dan choiri, 2019). objek penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Wawancara dan pengamatan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data.

Alat dan Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi langsung dan wawancara mendalam. Biasanya, wawancara melibatkan proses pengumpulan informasi untuk kebutuhan penelitian, melalui pertanyaan terbuka antara wawancara dan informan. Dengan bantuan, atau tanpa menggunakan wawancara (terbimbing), dimana pewawancara dan informan berpartisipasi, dalam kehidupan sosial jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, wawancara, sesuai dengan definisi Esterberg yang diberikan oleh Sugiyono, adalah saling berbagi informasi dan nasehat antara dua orang guna menghasilkan gagasan mengenai suatu topik tertentu untuk penulisan investigasi (Abubakar, 2021).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Pentingnya Hak Suara sebagai Bagian dari Demokrasi

Hak suara merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan setiap warga negara hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan politik (Simamora dkk., 2024). Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Palembang, pemahaman aktivis Generasi Z terhadap pentingnya hak suara terus berkembang. Mereka menyadari bahwa partisipasi politik tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan hak suara, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.

M. Eko Wahyudi dari PMII menegaskan bahwa hak suara bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sarana menjaga masa depan daerah:

"Saya paham Kita harus sadar bahwa memilih pemimpin adalah cara kita menjaga masa depan daerah kita. Hak suara itu penting karena satu suara bisa menentukan kebijakan yang memengaruhi hidup banyak orang."

Pandangan serupa disampaikan oleh Mustaufan Al-Fatih dari HMI, yang menekankan bahwa edukasi politik harus terus dilakukan agar generasi muda tidak bersikap apatis:

"Kami terus mengedukasi teman-teman bahwa suara kita sangat berharga. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa satu suara tidak penting, karena itu bisa menjadi faktor penentu dalam pemilu."

Teori interaksi simbolik diterapkan pada hasil wawancara mengenai pentingnya hak suara sebagai bagian dari demokrasi, dengan melihat bagaimana makna dan pemahaman mengenai hak suara dibangun melalui interaksi sosial antara aktivis Generasi Z dan masyarakat di Kota Palembang. Aktivis-aktivis tersebut, seperti yang dijelaskan dalam wawancara, berperan aktif dalam mendidik masyarakat mengenai nilai dan pentingnya partisipasi dalam Pilkada 2024.

Secara keseluruhan, melalui interaksi yang terjadi dalam kelompok-kelompok aktivis ini, generasi muda di Palembang mulai membangun kesadaran bersama tentang hak suara sebagai simbol dari kekuatan untuk mempengaruhi perubahan politik, yang penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Memahami bahwa Semua Kebijakan Lahir dari Politik

Kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, mengenai dampak kebijakan politik sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Kebijakan politik yang dihasilkan oleh pemimpin terpilih akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Tamrin dkk., 2024). Generasi Z di Kota Palembang menyadari bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memengaruhi masa depan mereka. Kesadaran ini menjadi dorongan bagi mereka untuk lebih aktif dalam proses politik, termasuk dalam Pilkada 2024, dengan harapan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

M. Wahyu Nugroho dari IMM menyoroti bahwa masih banyak generasi muda yang belum menyadari dampak kebijakan politik terhadap kehidupan mereka:

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

"Masih banyak anak muda yang berpikir bahwa politik tidak berdampak langsung pada mereka. Padahal, kebijakan politik memengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari biaya pendidikan hingga ketersediaan lapangan kerja."

Sementara itu, Abdi Ramdhani dari GMNI menyoroti bahwa kebijakan politik yang buruk dapat menimbulkan masalah sosial yang serius.

"Kita harus mengawasi dan memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat. Jika tidak, akan banyak hak-hak masyarakat yang terabaikan."

Teori interaksi simbolik menjelaskan bagaimana kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Palembang, terhadap dampak kebijakan politik terbentuk melalui proses komunikasi dan interaksi sosial (Rouf, Ahid, dan Sutrisno 2022). Aktivis Generasi Z berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang dampak kebijakan politik terhadap kehidupan sehari-hari, seperti dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pernyataan ini memperkuat analisis bahwa pemahaman tentang politik dibangun melalui pengalaman dan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan sosial. Aktivis berperan dalam menyebarkan makna bahwa politik bukan sekadar wacana elite, tetapi memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

3. Proses Rekrutmen Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya

Pemahaman tentang mekanisme pengusungan calon kepala daerah menjadi perhatian aktivis Generasi Z di Kota Palembang. Mereka melihat bahwa proses ini melibatkan berbagai faktor, seperti seleksi internal partai, survei elektabilitas, hingga rekomendasi dari tokoh masyarakat. Meski demikian, mereka mengungkapkan bahwa mekanisme ini masih belum sepenuhnya transparan, sehingga masyarakat kerap kesulitan memahami bagaimana partai politik menentukan calon yang akan maju dalam Pilkada (Komisi Pemilihan Umum, 2015).

Agung Rahmadani dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Raden Fatah menekankan peran mahasiswa dalam meningkatkan literasi politik di masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan mekanisme politik kepada masyarakat agar mereka dapat terlibat aktif dalam Pilkada.

"Kami di BEM sering mengadakan diskusi politik untuk membahas bagaimana partai politik memilih calon kepala daerah. Mahasiswa harus menjadi jembatan informasi antara proses politik dan masyarakat."

Sementara itu, M. Eko Wahyudi mengungkapkan bahwa partai politik kini banyak menggunakan survei untuk menilai calon yang potensial. Ia menjelaskan bahwa selain kader internal, tokoh masyarakat juga memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengusungan calon.

"Saya melihat partai politik sekarang lebih sering menggunakan survei untuk menilai calon yang potensial. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kader internal, tapi juga melihat figur di luar partai yang dianggap bisa membawa kemenangan."

Hasil wawancara dengan aktivis mahasiswa di Palembang, terlihat bahwa pemahaman mereka tentang mekanisme pengusungan calon kepala daerah dibentuk melalui proses interaksi sosial. Mereka menilai bahwa partai politik harus lebih transparan dalam proses tersebut agar masyarakat dapat memahami dan mempercayai proses politik. Teori interaksi simbolik memberikan kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana Generasi Z membangun pemahaman politik mereka melalui interaksi dengan lingkungan sosial (Simanjuntak & Djuyandi, 2024).

4. Program-program Tidak Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Aktivis Generasi Z di Kota Palembang menunjukkan sikap kritis terhadap program kerja dan visi-misi calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Mereka menganggap bahwa pemilih seharusnya tidak hanya terpengaruh oleh popularitas calon, tetapi juga perlu menilai sejauh mana program yang ditawarkan dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

masyarakat (Simamora dkk. 2024). Aktivis-aktivis ini berpendapat bahwa kajian mendalam terhadap visi-misi calon sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam janji-janji kosong.

M. Wahyu Nugroho dari IMM menjelaskan bahwa mereka sering mengadakan kajian terhadap visi-misi para calon kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memilih calon berdasarkan program kerja yang realistis, bukan semata-mata pada ketenaran atau popularitas calon.

"Kami di IMM sering mengkaji visi-misi para calon kepala daerah. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan popularitas, tetapi juga berdasarkan program kerja yang realistis."

Mustaufan Al-Fatih dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyoroti pentingnya keberlanjutan program kerja dari periode sebelumnya. Menurutnya, calon kepala daerah harus memastikan bahwa program-program yang sudah berjalan dengan baik dapat dilanjutkan, bukan memulai kebijakan baru yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Calon kepala daerah tidak boleh hanya fokus pada program baru, tetapi juga harus melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan dengan baik."

Hasil wawancara dengan aktivis mahasiswa di Palembang, jelas terlihat bahwa mereka memiliki pemahaman yang kritis terhadap visi-misi dan program kerja calon kepala daerah. Mereka mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk memilih calon berdasarkan program yang realistis dan dapat diwujudkan, bukan hanya karena popularitas atau janji kosong. Teori interaksi simbolik memberikan kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana aktivis membentuk pemahaman politik melalui interaksi sosial mereka dan menyebarkan pemahaman ini kepada masyarakat untuk menciptakan pemilih yang lebih kritis dan teredukasi (Halik 2017).

5. Memahami Pentingnya Koalisi Partai dalam Pilkada 2024

Aktivis Generasi Z di Kota Palembang memberikan pandangan yang beragam mengenai alasan mengapa calon kepala daerah perlu diusung oleh gabungan partai politik. Masing-masing aktivis menyadari pentingnya dukungan politik yang kuat, namun mereka juga menyoroti potensi tantangan yang bisa muncul dalam koalisi partai.

Mustaufan Al-Fatih dari HMI menjelaskan bahwa gabungan partai politik sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik calon kepala daerah. Menurutnya, koalisi yang solid tidak hanya memberikan dukungan politik yang lebih luas, tetapi juga mempengaruhi stabilitas pemerintahan yang akan dijalankan oleh calon terpilih.

"Gabungan partai politik diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik calon. Selain itu, koalisi partai juga memengaruhi stabilitas pemerintahan."

Abdi Ramdhani dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melihat koalisi partai politik sebagai langkah strategis dalam memastikan kemenangan calon kepala daerah. Ia menilai bahwa gabungan partai dapat meningkatkan daya saing calon dalam Pilkada dan memperkuat posisi politiknya setelah terpilih.

"Gabungan partai adalah langkah strategis untuk memastikan calon memiliki daya saing yang kuat dan dukungan politik yang solid setelah terpilih."

Aktivis Generasi Z di Palembang menunjukkan sikap yang konsisten dalam mendukung keberlanjutan koalisi partai sebagai elemen penting dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan yang akan datang. Teori interaksi simbolik menjelaskan bagaimana proses pembentukan sikap dan pemahaman ini terjadi melalui interaksi sosial, di mana makna-makna yang dibangun para aktivis mencerminkan bagaimana mereka memandang koalisi dalam konteks politik yang lebih luas (Derung, 2017).

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

6. Keterlibatan dalam Kajian dan Diskusi Politik

Keterlibatan Aktivis Generasi Z di Kota Palembang pada Pilkada 2024 menunjukkan peran aktif mereka dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivis muda ini terlibat dalam berbagai bentuk aksi politik yang mencerminkan komitmen mereka terhadap perubahan dan kemajuan di daerah mereka (St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana, 2024). Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah melalui diskusi politik, kajian, demonstrasi, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian komunitas berbasis isu. Aksi-aksi ini tidak hanya terbatas pada ruang kampus, Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah melalui diskusi politik, kajian, demonstrasi, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian komunitas berbasis isu. Aksi-aksi ini tidak hanya terbatas pada ruang kampus, tetapi juga meluas ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik.

Mustaufan Al-Fatih dari HMI adalah salah satu contoh aktivis yang terlibat secara mendalam dalam kegiatan analisis dan kajian politik. Sebelum melakukan aksi nyata, Mustaufan bersama rekan-rekannya melakukan kajian mendalam mengenai isu-isu yang sedang berkembang dalam Pilkada 2024, baik terkait dengan calon-calon yang akan maju maupun mekanisme pemilihan.

"Di HMI, kami sering melakukan kajian politik untuk menganalisis berbagai calon kepala daerah dan partai pengusungnya. Kami yakin, kajian ini sangat penting agar generasi muda bisa membuat keputusan politik yang lebih cerdas."

Abdi Ramdhani dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lebih banyak terlibat dalam aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada. Ia percaya bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam hal transparansi calon dan partai politik yang terlibat.

"Demonstrasi adalah salah satu cara kami untuk menunjukkan bahwa generasi muda peduli dengan masa depan daerah. Kami menuntut adanya transparansi dalam proses Pilkada agar masyarakat bisa memilih dengan informasi yang jelas dan akurat."

Hasil wawancara dengan aktivis Generasi Z di Palembang, dapat disimpulkan bahwa meskipun mereka memiliki fokus dan kepedulian terhadap isu-isu yang berbeda, mereka sepakat bahwa politik bukan hanya tentang memilih pemimpin, melainkan juga tentang bagaimana kebijakan yang dihasilkan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mereka sangat peduli terhadap berbagai isu penting, mulai dari masalah lingkungan, pendidikan, pekerjaan, hingga banjir yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa makna-makna yang mereka bangun tentang politik dan isu-isu sosial dibentuk melalui interaksi sosial mereka dengan sesama aktivis, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam proses politik tersebut

7. Keterlibatan dalam Lembaga Pemantau Pilkada

Terlibat dalam lembaga pemantau Pilkada atau organisasi masyarakat yang mengawasi jalannya pemilu adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan (PANWASLIH, 2024). Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengawasi tahapan-tahapan Pilkada, mulai dari pendataan pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi potensi kecurangan dan menyuarakan perbaikan jika ditemukan pelanggaran.

Agung Ramadhani dari BEM UIN Raden Fatah menekankan tanggung jawab mereka dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan mendukung masyarakat agar lebih paham tentang hak mereka dalam proses pemilu.

"Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya Pilkada sesuai dengan prinsip demokrasi dan mendukung masyarakat agar lebih paham tentang hak mereka dalam proses pemilu."

Abdi Ramdhani dari GMNI menyoroti pentingnya pengawasan Pilkada yang bertujuan menjaga integritas pemilu serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengawasan.

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

"Pengawasan Pilkada yang kami lakukan bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses."

Hasil wawancara dengan aktivis Generasi Z di Palembang, dapat disimpulkan bahwa Teori interaksi simbolik dapat menjelaskan bagaimana makna mengenai pengawasan Pilkada terbentuk melalui interaksi sosial dalam organisasi pemantau. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pemantauan ini berinteraksi untuk membangun pemahaman yang sama tentang pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemilu (Halik, 2017).

8. Kampanye Politik melalui Media Sosial

Dalam menjawab pertanyaan tentang apakah media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan Generasi Z, seluruh narasumber sepakat bahwa media sosial memegang peranan penting dalam hal ini. Mereka mengakui bahwa media sosial menjadi sarana utama yang digunakan oleh generasi muda untuk mengakses informasi politik secara cepat dan luas. Namun, mereka juga menyadari bahwa ada sisi lain yang harus diperhatikan, mengingat potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi.

M. Wahyu Nugroho dari IMM juga memberikan pandangannya terkait media sosial. Menurutnya, media sosial memang memiliki peran besar dalam memperkuat kampanye politik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di dunia digital.

"Media sosial itu efektif untuk menyebarkan pesan politik, tapi kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan untuk tujuan yang tidak baik."

M. Eko Wahyudi dari PMII melihat media sosial sebagai pedang bermata dua.

"Di satu sisi, media sosial bisa sangat bermanfaat untuk mempercepat proses edukasi politik. Tetapi di sisi lain, media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan hoaks atau informasi yang menyesatkan."

Mustaufan Al-Fatih, aktivis dari HMI, menekankan bahwa media sosial memiliki kekuatan untuk mempercepat penyebaran informasi politik, yang membantu meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda.

"Media sosial memungkinkan informasi politik untuk tersebar lebih cepat, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengetahui perkembangan politik terkini."

Hasil wawancara dengan aktivis Generasi Z di Palembang, dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat akan peran penting media sosial dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda (Salwa Eka Afiani, 2024). Aktivis menyoroti manfaat besar yang dapat diperoleh dari penyebaran informasi politik yang cepat dan efektif melalui media sosial, yang mempermudah mereka untuk tetap terinformasi dan terlibat dalam isu-isu politik terkini. Namun, mereka juga menyadari bahwa media sosial memiliki potensi penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan.

Berdasarkan teori interaksi simbolik, interaksi tersebut menjadi sarana bagi individu untuk menciptakan dan menyebarkan makna yang berkaitan dengan isu-isu politik, yang mempengaruhi bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses politik . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, media sosial tetap menjadi alat yang tidak terhindarkan dalam proses politik yang semakin dinamis.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait judul Pemahaman dan Praktik Komunikasi Politik Aktivis Generasi Z Menjelang Pilkda 2024 di Kota Palembang, maka dapat diambil Kesimpulan yang pertama yaitu, bahwa Aktivis Generasi Z di Kota Palembang memahami bahwa partisipasi politik dalam Pilkada 2024 berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Mereka aktif mengedukasi pentingnya hak suara melalui diskusi, kajian, dan kampanye. Kesadaran ini membuat mereka lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah dan memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

rakyat. Namun, mereka juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proses pemilihan calon kepala daerah, yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan politik daripada aspirasi masyarakat.

Kedua, Keterlibatan aktivis Generasi Z di Kota Palembang dalam Pilkada 2024 menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam berbagai aspek politik, mulai dari kajian dan diskusi, pengawasan pemilu, hingga kampanye melalui media sosial. Mereka terlibat dalam diskusi politik, advokasi kebijakan, demonstrasi, dan pengorganisasian komunitas berbasis isu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan pemilih membuat keputusan yang rasional. Selain itu, mereka juga berperan dalam lembaga pemantau Pilkada guna memastikan transparansi dan mencegah kecurangan, membangun kesadaran kolektif melalui interaksi dalam organisasi pengawasan.

Peneliti memberi saran agar Aktivis Generasi Z di Palembang terus memperluas kampanye kesadaran politik melalui berbagai platform. Edukasi mengenai hak suara, dampak kebijakan, serta pemahaman terhadap program calon kepala daerah harus ditingkatkan. Partai politik juga perlu lebih transparan dalam menjelaskan mekanisme pemilihan calon kepada masyarakat. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih pemimpin. Selain itu, koalisi partai politik yang solid penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan pasca-Pilkada. Terakhir, aktivis mahasiswa dapat memanfaatkan diskusi dan kajian politik untuk meningkatkan pemahaman generasi muda.

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses pembuatan jurnal ini.

6 DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muhid dan Winarto Eka Wahyudi. (2020). *Interaksi Simbolik: Teori dan Aplikasi Dalam Penelitian Pendidikan dan Psikologi*. Madani.

2. Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Cetakan pe).

3. Chamdan, Ginanjar, T. (2022). *Literasi Digital* (TIM PENYUSUN (ed.); cetakan pe, Vol. 14, Issue 5). PRCI.

4. Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, *2*(1), 118–131. https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33

5. Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, *2*(01), 61–72. https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342

6. Halik, A. (2017). Ekstensi Simbolik Aktivisme Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi*, *5*(1), 1–14.

7. Harahap, M. A., & Adeni, S. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, *7*(2), 13–23.

8. Khairunisa, Y., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). *Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi di Sekolah : Perspekif Sosiologi Tentang Dampak dan Solusi*. 65–84.

9. Komisi Pemilihan Umum. (2015). *Proses Pencalonan Pilkada Harus Transparan dan Partisipatif*. Kpu.Go.Id. https://www.kpu.go.id/berita/baca/3885/Transparan-itu--ujar-Hadar--berarti-keterbukaan-seluas-luasnya.-Dokumen-dokumen-yang-diterima-oleh-KPU-selama-tahapan-pendaftaran-pasangan-calon-misalnya--harus-dibuka-atau-dipublikasikan

10. Krina Loina Lalolo, P., & dan Munawaroh Zainal. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal ASPIKOM*, *3*(4), 737–753.

11. PANWASLIH. (2024). *Peran dan Keterlibatan Masyarakat Sipil Sangat Penting Lindungi Hak Politik Warga*. Panwaslih.Acehutara.Go.Id. https://panwaslih.acehutara.go.id/berita/kategori/berita/peran-dan-

keterlibatan-masyarakat-sipil-sangat-penting-lindungi-hak-politik-warga?utm_source

12. Putra, A. B., & Pribadi, M. A. (2020). Interaksi Simbolik dalam Kegiatan After Sales di Dealer Nissan (Studi Kasus PT. Wahana Wirawan). *Prologia*, *4*(1), 135. https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6453

13. Razaqa, M. K., Prawira, F. R., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, *01*(02), 132–141.

14. Salwa Eka Afiani. (2024). *Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Generasi Muda*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/salwaekaafiani0551/6674a6cfed641565110a61d3/peran-media-sosial-dalam-meningkatkan-kesadaran-politik-di-kalangan-generasi-muda

15. Sholihatun. (2018). *Sejarah Jamiatul Khair : Dalam Pembentukan Masyarakat Islam Betawi (studi kaus Sejarah Islam Betawi Abad XX)* (R. Reang (ed.); Cetakan I). Yayasan Omah Aksoro Indonesia.

16. Sidiq,umar dan choiri, M. miftachu. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di bidang pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)).

17. Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z di Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 5918–5922. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13306

18. Simanjuntak, A. S., & Djuyandi, Y. (2024). *GEN-Z DAN POLITIK : MENELUSURI STRATEGI KAMPANYE MEDIA SOSIAL ATALIA PRARATYA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 yang mudah dan cepat maka platform media sosial dapat di jadikan penghubung antara komunikator politik . Atalia sering menggunakan media sosialnya u*. *3*(2), 62–74. https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i2.56107

19. St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana, M. I. (2024). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. *12*(Idm), 27–38.

20. Tamrin, S. H., Tahir, A., Syahrinullah, S., Rakasiwi, F., Ulfa, M., Bhayangkari, I. Y., Sajidin, M., Mu'min, M., & Farhanuddin, F. (2024). Penguatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda dalam Menghadapi Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Majene. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *4*(3), 2178–2188. https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5250

21. Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *17*(1), 98–111. https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423